

SEJARAH DINAS PERTANIAN PROPINSI NTB

Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman pendudukan Jepang urusan pertanian ditangani oleh Gunseikanbu Sangyobu. Dibandingkan dengan Belanda, Jepang lebih intensif melakukan transfer ilmu pengetahuan pertanian ke petani. Setelah Proklamasi Kemerdekaan/Kabinet Presidentil pada tanggal 2 September 1945 urusan pertanian diserahkan kepada Kementerian Kemakmuran, dimana di dalamnya terdapat Koordinator Pertanian yang membawahi urusan pertanian rakyat, pendidikan, perikanan, kehewan, perkebunan, kehutanan dan penyelidikan pertanian yang pada saat itu koordinatornya dipegang oleh Bpk. Ir. Kaslan A. Tahir.

Pada awal kemerdekaan, daerah ini bernaung dibawah Propinsi Sunda Kecil dengan ibu kotanya Singaraja. Gubernur pada saat itu adalah Mr. I Gusti Ketut Puja. Pemerintah membentuk Jawatan Pertanian Rakyat, dengan wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kepala Jawatan untuk wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa adalah Bpk. Wiyono (1947-1949). Sejak saat itulah Pemerintah Daerah bertekad untuk memajukan daerahnya, dengan menanam Palawija (Kedelai) dan Sayuran (Bawang Merah). Diketahui bahwa kedua komoditas ini sangat mempunyai prospek dimasa mendatang. Berkat ketekunan dan minat yang besar dari petani di daerah ini kedua komoditas ini menjadi terkenal karena kedelai dan bawang merahnya. Peristiwa keberhasilan pada masa penjajahan terulang kembali. Namun secara regional dan nasional kondisi pangan kita terutama beras masih merupakan persoalan yang sangat besar.

Perkembangan selanjutnya yang disebut dengan zaman liberal (1945-1959) masih banyak dijumpai adanya daerah-daerah miskin/tertinggal. Persoalan pangan masih mendominasi masyarakat pedesaan. Namun demikian beberapa usaha pertanian dijalankan lebih sistimatis, dimana rencana yang dikenal dengan nama Kasimo (Rencana Produksi 3 tahun yaitu dari tahun 1948-1950) tidak dapat berjalan lancar sebagai akibat gejolak revolusi fisik pada saat itu. Rencana ini digabungkan dengan mencantumkan kegiatan-kegiatan :

1. Perbanyak produksi benih unggul tanaman padi dan palawija tertentu.
2. Perbaiki dan perluasan jaringan irigasi.
3. Peningkatan penggunaan pupuk.
4. Peningkatan pemberantasan hama dan penyakit.
5. Peningkatan pengendalian bahaya erosi.

Perkembangan selanjutnya, Pemerintah mencanangkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang pada intinya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menuju tercapainya swasembada pangan dan distribusi pendapatan nasional yang adil dan merata. Cabang-cabang produksi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Rakyat diikut sertakan dalam pengerahan semua modal dan potensi dalam negeri, dimana kaum buruh dan tani memegang peranan yang sangat penting. Pemerintah bertekad mencapai swasembada beras dalam tahun 1962 melalui upaya jangka pendek dan jangka panjang.

Upaya jangka pendek diprioritaskan untuk dapat mencapai swasembada beras dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melalui Program Intensifikasi tanaman padi dalam berbagai bentuk yang pada saat itu dikenal dengan Intensifikasi Massal (Inmas) dan Sentra Padi (perbaikan saluran irigasi, bibit unggul, pupuk, pemberantasan hama penyakit dan perlombaan). Program ini merupakan kelanjutan dari program Intensifikasi massal. Program Sentra Padi mengemban tugas utama yaitu dapat dipergunakan dalam penyediaan bibit unggul, pupuk, obat-obatan, alat pemberantasan hama dan alat-alat pertanian . Pengembalian Kredit dilakukan dengan cara in natura (dengan padi). Program Sentra Padi mengalami hambatan karena permasalahan pendanaan dan logistik, disamping itu juga disebabkan oleh kurangnya tenaga terdidik dan terlatih. Lebih jauh kegagalan ini disebabkan karena lemahnya manajemen sistem pekreditan dan penentuan harga padi sehingga pengembalian kredit yang ditetapkan lebih rendah dari harga pasar.

Program yang kedua adalah Program Ekstensifikasi melalui perluasan areal dengan merehabilitasi serta menyempurnakan dan memperluas sistem irigasi, perhatian terbesar di arahkan kepada produksi beras.

Pada tahun 1947 Jawatan Pertanian Rakyat yang dipimpin oleh Bpk. Suwarjo sebagai Kepala Pusat Jawatan Pertanian Rakyat mengemukakan gagasan pembentukan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD). Balai ini merupakan tempat yang dikelilingi areal seluas 2 ha, dan diusahakan sebagai tempat percontohan yang menarik, Dilingkungan Balai dilaksanakan kursus-kursus, pertemuan dan musyawarah untuk menambah pengetahuan dan keterampilan rakyat dibidang pertanian, perikanan, kehewanian, kerajinan, koperasi, pengairan dan sebagainya.

Disamping itu dalam Balai tersebut petani juga dapat membeli alat-alat pertanian, sarana produksi yang diperlukan. Walaupun dalam tahun 1947 BPMD telah dimasukkan dalam Rencana Produksi Tiga Tahun Kementrian Pertanian yang lazim disebut Plant Kasimo. Tetapi rencana ini baru dapat terlaksana sejak tahun 1950 yang pada masa itu Kepala Jawatan Pertanian dijabat oleh Bpk. R. Suyitno (1949-1958). Periode ini dikenal dengan menggunakan metode ' Tetesan Minyak " alias alon-alon asal kelakon.

Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terbentuk berdasarkan UU. No. 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan mulai melaksanakannya tanggal 17 Desember 1958. Selanjutnya tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Propinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur pertamanya yaitu R. AR. Muhamad Ruslan Tjakraningrat. Seiring dengan pembentukan daerah Nusa Tenggara Barat di atas, Jawatan Pertanian Rakyat yang ada diubah namanya menjadi Dinas Pertanian Rakyat. Di NTB kewenangan penanganan bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jln. Pejanggik No. 10 Mataram.

(Sumber : Sejarah Perkembangan Dinas Pertanian)

Periode selanjutnya dikenal dengan nama Periode Terpimpin (1959-1963). banyak mengalami perubahan. Dari filsafat "alon-alon asal kelakon" menjadi segalanya harus cepat dan tepat". Rencana yang telah ditetapkan sebelumnya diganti dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang meluas dan menyeluruh. Pelaksanaannya sudah tidak secara rutin lagi, tetapi harus merupakan gerakan yang dinamis. Gerakan Intensifikasi Produksi Padi saat ini diberi nama Gerakan Swasembada Beras (SSB) dan pada tahun 1970 dikenal dengan nama Gerakan Swasembada Bahan Makan (SSBM).

(Sumber :90 tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia).

Memasuki tahun 1963 – 1964 dilaksanakan Program Demonstrasi Massal (Demas) yang merupakan Cikal Bakal Bimbingan Massal (Bimas) dan secara luas dilaksanakan pada tahun 1964. Pada program ini terjadi terobosan seperti penggunaan benih unggul, pemupukan, pengairan, pemberantasan hama, mekanisasi, pengolahan lahan dan sebagainya. Program ini lebih dikenal dengan Revolusi Hijau. Program jangka panjang pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat mengimbangi kebutuhan pangan. Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang dicetuskan dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana yaitu mendorong partisipasi aktif rakyat dan segenap aparatur negara serta seluruh semangat dan daya kerja bangsa dalam suatu gerakan massa yang disebut Front Nasional dan secara khusus di bidang pertanian disebut dengan Land Reform.

Tujuan Bimas yang pada hakekatnya sama dengan tujuan penyuluhan pertanian saat itu yaitu :

1. Menimbulkan perubahan perilaku dan motif tindakan para petani kearah sasaran yang telah ditentukan.
2. Menuntun, mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku petani dalam mencapai taraf usaha dan kehidupan yang lebih baik.
3. Menimbulkan dan memelihara semangat para petani agar selalu giat memperbaiki segala usahanya.

4. Membantu para petani agar lebih berswadaya dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Sasaran Bimas adalah petani/kelompok tani, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek. Sebagai obyek, petani merupakan titik sasaran pelayanan. Sedangkan sebagai subyek petani merupakan pemimpin sekaligus pelaksana utama dalam usaha taninya.

Pada tahun 1974 Dinas Pertanian Rakyat diubah namanya menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan tahun 2000 berubah menjadi Dinas Pertanian. Selama beberapa periode yang dilalui Kepala Dinas Pertanian telah beberapa kali mengalami pergantian. Pejabat Kepala Jawatan/Dinas Pertanian Rakyat/Dinas Pertanian Tanaman Pangan/Dinas Pertanian dari sejak terbentuk sampai sekarang adalah :

1. Tahun 1958-1962 : R. Soeyitno
2. Tahun 1962-1963 : R. Soeyudi
3. Tahun 1963-1965 : M. Soembarhadi
4. Tahun 1965-1967 : A.R. dg. Matutu
5. Tahun 1967-1969 : Ir. Indro Djarwo
6. Tahun 1969-1971 : A.R. dg. Matutu
7. Tahun 1971-1978 : Ir. Yacob Mardjadi
8. Tahun 1978-1987 : Ir. Endarto Djaswadi
9. Tahun 1987-1992 : Drs. Tri Wibowo
10. Tahun 1992-1996 : Ir. Bambang Irawan
11. Tahun 1996-1999 : Ir Noverdi Bross
12. Tahun 1999-2003 : Ir. Muzani Mirza SU
13. Tahun 2003-2004 : Ir. Yacoub Abidin, MM
14. Tahun 2004-2006 : Ir. H. Agil Husein, M.Sc
15. Tahun 2006 - 2008 : Dr. Ir. Mashur, MS
16. Tahun 2008 - 2010 : Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev
17. Tahun 2010 - 2013 : Ir. H. Abdul Ma'ad, MM

18. Tahun 2013 - 2015 : Ir. H. Husni Fahri, MM

19. Tahun 2015 - 2015 : Ir. H. Mokhlis, M.Si

20. Tahun 2015 - Sekarang : Ir. Husnul Fauzi, M.Si

R. Soejitno merupakan Kepala Dinas Pertanian Rakyat periode 1958 – 1962 dan merupakan Kepala Dinas yang I di Nusa Tenggara Barat. Era ini termasuk dalam era awal kemerdekaan dan Era Ekonomi Terpimpin. Dibawah kepemimpinan Bapak R. Soejitno. masyarakat pertanian diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang dikenal dengan program Inmas dan dilanjutkan dengan Sentra Padi.. Penguasaan teknis produksi dimasyarakatkan secara meluas

Pada periode 1962 – 1963 Kepala Dinas Pertanian Rakyat dijabat oleh R. Soeyudi. Periode ini masih termasuk dalam era ekonomi terpimpin. Kegiatan masyarakat petani terpusat kepada suatu gerakan yang disebut Gerakan Swa Senbada Bahan Makan (SSBM). Pada Tahun 1963 ini dicanangkan Program Demonstrasi Massal (Demas) yang merupakan cikal bakal Bimbingan Massal (Bimas). Panca Usaha Tani dimasyarakatkan secara terkoordinasi. Namun pada periode ini masyarakat petani cenderung mengikuti arus perkembangan pengelompokan partai dan golongan yang membawa mereka kepada persaingan saling mencurigai.

Pada periode 1963 – 1965 Kepala Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Barat dijabat oleh M. Soembarhadi. Pada periode ini Program Bimas telah meluas dilaksanakan. Terobosan penggunaan benih unggul pemeliharaan tanaman sampai dengan penggunaan peralatan mekanisasi telah menyebar dimasyarakat petani. Periode ini dikenal dengan Revolusi Hijau. Pengelompokan masyarakat berdasarkan kelompok, golongannya mencapai puncaknya dan pada masa ini juga terjadi suatu stagnasi pembangunan pertanian karena adanya pemberontakan G. 30 S PKI.

Tahun 1965 – 1967 jabatan Kepala Dinas yang saat itu sedang kosong, dijabat oleh A.R. dg. Matutu. Pada masa ini program pertanian dimasa yang lalu dilanjutkan secara lebih intensif. Masyarakat petani sangat bergairah mengelola kegiatan usaha taninya, karena adanya penyebaran varietas unggul baru seperti Varietas PB 5. Produksi beras mulai memperlihatkan peningkatannya. Di NTB yang pada saat itu belum ditemukan adanya sistem GORA, di beberapa tempat seperti daerah Lombok Selatan, persoalan pangan masih menjadi ganjalan yang sangat berarti.

Periode tahun 1967 – 1969 Kepala Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Barat, dijabat oleh Ir. Indro Jarwo. Kegiatan pembangunan pertanian melalui sistem Bimas semakin terlihat mantap. Beberapa Varietas Unggul seperti Varietas Kerawang, Pelita yang mempunyai rasa enak dapat dikembangkan oleh petani. Petani dapat memilih beberapa varietas padi jenis unggul hasil persilangan yang tersedia. Untuk komoditas palawija telah dapat dikembangkan dengan baik seperti Kedelai, Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau di beberapa wilayah sesuai dengan kondisi agroklimatnya. Demikian juga beberapa tanaman buah-buahan dan sayuran mulai dapat terlihat pengembangannya.

Pejabat Kepala Dinas Pertanian Rakyat periode 1969 – 1971 dikukuhkan A.R. dg Matutu yang periode sebelumnya dipercaya sebagai pelaksana harian Kepala Dinas. Pertanian Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan pertanian di Nusa Tenggara Barat semakin memperlihatkan eksistensinya. Namun di beberapa wilayah terutama wilayah yang tergolong lahannya tadah hujan, sering mengalami kegagalan panen. Penyebab kegagalan ini telah diuraikan di muka yaitu jumlah dan hari hujan di wilayah NTB yang hanya 3 bulan dalam setahun.

Pejabat Kepala Dinas Pertanian Rakyat periode 1971 – 1978 adalah Ir. Yacob Mardjadi. Pada periode ini terjadi perubahan nama Dinas Pertanian Rakyat menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan tepatnya pada tahun 1974. Dengan perubahan nama ini jelas penanganan komoditas pertanian tidak lagi menangani komoditas perkebunan dan perikanan. Sejak saat itu penanganan komoditas tanaman pangan sangat terfokus. Hal ini menyebabkan adanya lonjakan produksi tanaman pangan di daerah Nusa Tenggara Barat.

Periode tahun 1978 – 1987 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi NTB dijabat oleh Ir. Endarto Djaswadi. Penampilan wajah, bentuk dan isi Institusi Dinas, BBI, Kebun sampai ketinggian BPP menjadi perhatiannya. Pada saat inilah pelaksanaan Operasi Tekad Makmur Gogo Rancah dilaksanakan. Kegiatan lomba dalam rangka memperindah penampilan dan isi institusi dinas baik dalam lingkungan kantor, BBI maupun kebun, sering dilakukan. Penampilan terbaik menjadi impian setiap petugas pertanian.. Melalui cara ini terlihat adanya berbagai kemajuan baik dibidang teknis pertanian maupun non teknis seperti olah raga, kesenian maupun pertamanan. Foto Kenangan GORA.

Tahun 1987 – 1992 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi NTB, dijabat oleh Drs. Tri Wibowo. Kegiatan Inmum, Insus dan Supra Insus mewarnai pembangunan pertanian saat ini. Penggunaan pupuk Urea, TSP dan KCl pada tanaman padi dengan perbandingan 3 : 2 : 1 menjadi trend saat itu. Pada saat ini pula pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan marginal dilaksanakan. Pematang diareal lahan gogo rancah dioptimalkan pemanfaatannya. Demonstrasi, pengujian baik yang menyangkut penggunaan varietas pemupukan maupun ketahanan terhadap hama penyakit di setiap kecamatan dilaksanakan. Peningkatan produksi padi terlihat melonjak secara tajam. (% peningkatan produksi th 1987 mencapai hampir 10 %).

Tahun 1992 – 1996 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi NTB dijabat oleh Ir. Bambang Irawan. Pada masa ini program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura mulai dikumandangkan. Masing-masing komoditas Unggulan, Andalan dan Penunjang dibentuk berdasarkan wilayah komoditas. Berbagai macam kontes, lomba baik ditingkat pusat maupun daerah dilaksanakan untuk dapat menggalakkan pengembangan komoditas tersebut diatas. Orientasi pengembangan tanaman tidak hanya bertumpu kepada penggunaan teknologi di lahan sawah, namun telah merambah kepada pemanfaatan lahan kering.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 1996 – 1999 dijabat oleh Ir. Noverdi Bross. Masing-masing pejabat mempunyai ciri kepemimpinan yang khas. Seperti halnya Kepala Dinas Pertanian saat ini, dikenal slogan " Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu". Reformasi mulai mewarnai kepemimpinannya. Pengkaderan kepemimpinan mulai dirintis. Proses pembangunan pertanian tanaman pangan dilaksanakan

atas dasar musyawarah/ kesepakatan bersama. Penanganan kegiatan penyuluhan dilapangan diarahkan secara profesional. Penyuluh dituntut untuk dapat menjadi seorang yang spesialis berdasarkan komoditas yang ditekuninya.

Tahun 1999 – 2003 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi NTB dijabat oleh Ir. Muzani Mirza SU dan pada saat ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan berubah nama menjadi Dinas Pertanian. Otonomi daerah telah mewarnai kegiatan pembangunan pertanian pada masa ini. Kewenangan pelaksanaan pembangunan telah diberikan kepada kabupaten/kota. Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Propinsi. Pelaksanaan kegiatan bantuan petani berupa peralatan Traktor, Pompa air, Dryer, Power Tresher diadakan secara besar-besaran melalui kegiatan Proyek SPL dengan bantuan dana Jepang. Sejak saat itu pula kelompok pelayanan jasa yang dikenal dengan nama UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian) mulai populer dimasyarakat petani.

Tahun 2002 – 2004 Kepala Dinas Pertanian Propinsi NTB dijabat oleh Ir. Yacoub Abidin MM. Kegiatan pembangunan pertanian saat ini sebagian besar melanjutkan kegiatan program yang dilaksanakan sebelumnya. Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura masih mendominasi sebagian besar kegiatannya. Proksi Mantap begitulah program yang sedang populer dikumandangkan.

Tahun 2004 - 2006 Kepala Dinas Pertanian Propinsi NTB dijabat oleh Ir. H. Agil Husein MSc. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Program Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilaksanakan pada periode sebelumnya lebih dimantapkan pelaksanaannya. Ketajaman, ketelitian dan pemahaman yang mendalam ditanamkan, pada gilirannya dapat memberikan suatu penampilan yang terbaik kepada semua lapisan masyarakat.

Tahun 2006 - 2008 Kepala Dinas Pertanian Propinsi NTB dijabat oleh Dr. Ir. Mashur,MS. Menggantikan Ir. Agil Husein,MSc yang telah memasuki masa pensiun (Januari 2006). Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Propinsi NTB Dr. Ir.Mashur,MS adalah Kepala BPTP NTB. Dengan ilmu yang dimiliki diharapkan dapat memimpin Dinas Pertanian agar lebih maju dan jaya.

Tahun 2008 - 2010 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi NTB dijabat oleh Ir.Pending Dadih Permana, M.Ec.Devmenggantikan Dr.Ir.Mashur, MS yang menjabat sebagai Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Propinsi NTB. Kepala Dinas Pertanian TPH Propinsi NTB ini terkenal dengan sosok seorang pemimpin yang tegas, cerdas, berwibawa dan ramah akan menghantarkan Dinas Pertanian TPH pada puncak kejayaannya. Berdasarkan Perda Prov. NTB No. 7 tahun 2008, tanggal 25 Agustus 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 26 Agustus 2008 maka dengan resmi Dinas Pertanian berganti nama menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tahun 2010 - 2013. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat dijabat oleh Ir.H.Abdul Ma'ad, MM menggantikan Ir.Pending Dadih Permana, M.EC.Dev yang menjabat sebagai Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI. Ir. H.Abdul Ma'ad,MM dipandang cakap dan mampu untuk mensukseskan Program Unggulan Provinsi NTB yaitu PIJAR (Sapi Jagung dan Rumput Laut).

Tahun 2013 - 2015. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat dijabat oleh Ir.H.Husni Fahri, MM menggantikan Ir.H. Abdul Ma'ad, MM yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Ir. H.Husni Fahri, MM dipandang cakap dan mampu untuk mensukseskan Program Unggulan Provinsi NTB yaitu PIJAR (Sapi Jagung dan Rumput Laut) melanjutkan apa yang telah dirintis oleh kepala dinas sebelumnya. Disamping program PIJAR, Ir. Husni Fahri, MM menggagas terbentuknya HORTI PARK di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, yang telah diresmikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada hari Sabtu, 13 Desember 2014 dalam rangkaian acara peringatan HUT NTB ke 56.

Tahun 2015 - 2015. Terhitung sejak 28 Januari 2015 sampai dengan Juli 2015, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. NTB dijabat oleh Ir. H. Mokhlis, M.Si menggantikan Ir. H. Husni Fahri, MM yang diberi tugas baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tahun 2015 - sekarang, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dijabat oleh Ir. Husnul Fauzi, M.Si menggantikan Ir. H.Mokhlis, M,Si yang mencalonkan diri sebagai Bupati Sumbawa Periode 2015 - 2019. Ir. Husnul Fauzi, M.Si mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB diberi amanah untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan di Dinas Pertanian TPH NTB melalui program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai.